

RINGKASAN

Deby Haries Hardika, 2020, **Implementasi Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Probolinggo**, Pembimbing I: Husni Mubarq, S.Fi.I.,M.IP, Pembimbing II: Verto Septiandika, S.Sos.,M.AP

Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah. Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Terbentuknya suatu kebijakan publik tentang Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK) yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah salah satu upaya untuk membuat sistem tentang pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, cepat, singkat, aman, modern, akuntable dan menguntungkan masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana Implementasi LAPAK yang ada di Desa Tamansari serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi kebijakan.. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan instrument yaitu: interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, setelah data dikelola dan selanjutnya analisis dengan cara berfikir deduktif, yaitu menganalisis data umum untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Berdasarkan analisis data penelitian, mengenai implementasi LAPAK dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari mengutamakan beberapa variabel penting yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dengan keempat variabel itulah pemerintah Desa Tamansari mengimplementasikan kebijakan LAPAK, Komunikasi yang baik antara pihak Kecamatan dan Desa serta masyarakat, Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menjalankan aplikasi LAPAK, Sarana dan prasarana yang lengkap mendukung jalannya kebijakan , Disposisi atau watak pelaksana kebijakan yang baik dan Struktur Birokrasi yang tidak rumit membuat Implementasi Kebijakan berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan, Pelayanan

SUMMARY

Deby Haries Hardika, 2020, **implementation of fast service administrative district (LAPAK) in the Ministry of Population Administration in Probolinggo District**, Supervisor I: Husni Mubarok, S.Fil.I.,M.IP, Supervisor II: Verto Septiandika, S.Sos.,M.AP.

Population is the main base and the focus of all development problems. Almost the development activities are both sectoral and in directional sectors. The idea of drafting an administrative system that concerns the entire population problem, which includes the registration of residents, the civil Registry, the management of residential information, should be a concern to make it happen. The establishment of a public policy on the District Administration Rapid Service (LAPAK) initiated by the Government of Probolinggo district is one of the efforts to create a system about the quality of population administration services, fast, Safe, modern, accountable and profitable communities.

The purpose of this research is to implement the implementation of LAPAK in Tamansari village and know the supporting factors and barriers in policy implementation. This type of research is field research and research is descriptive. The methods of data collection using instruments are: interview, observation, and documentation. Methods of data analysis using qualitative methods, after managed data and subsequent analysis by thinking deductive, namely analyzing the general data to get a new knowledge conclusions that are more specific.

Based on the analysis of the research data, regarding the implementation of LAPAK in the Ministry of Population Administration can be concluded that the implementation of policies conducted by the Government of Tamansari village prioritizes several important variables, namely : Communication, resources, disposition and bureaucratic structure. With these four variables the village of Tamansari government implemented LAPAK policy, good communication between the District and village and the community, human resources competent to run applications LAPAK, facilities and infrastructure A complete support of the course of policy, disposition or character of good policy executor and uncomplicated bureaucracy structure makes the implementation of the policy run well.

Key words: Population administration, policy implementation, service